

## KONTRIBUSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Satria Zulkarnein<sup>\*1</sup>, Yusrizal<sup>1</sup>, Niswanto<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Universitas Syiah Kuala

### Abstrak

Majelis Pendidikan Nagan Raya memiliki peran sebagai lembaga independen yang berbasis masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: perencanaan program, mekanisme pelaksanaan program, evaluasi program dan hambatan-hambatan yang dihadapi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam memberikan kontribusi pembangunan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan 7 program yang sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanahkan dalam qanun yang berlaku. (2) Mekanisme pelaksanaan program yang dilakukan Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya dijalankan dengan manajemen yang baik yaitu dengan melaksanakan *planning, organizing, actuating dan controlling*. (3) Evaluasi yang dilakukan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya tidak dilaksanakan dengan menjalankan fungsi manajemen dengan baik, mealainkam hanya berfokus pada setiap masalah atau kesenjangan yang terjadi pada setiap program melalui observasi langsung. (4) Hambatan utama yang ditemukan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam memberikan kontribusinya pendidikannya adalah *Political Will* dari Bupati Nagan Raya serta defisitnya anggaran daerah.

**Kata Kunci:** Kontribusi, Majelis Pendidikan Daerah, Pembangunan Pendidikan

### Abstract

*Regional Education Council of Nagan Raya have a role as an independent community-based organization which give its contributions in giving solution or consideration to local government in deciding the education policies. The aims of this research were to find out the planning, the mechanism, the evaluation and the obstacles which faced by Regional Education Council of Nagan Raya in giving its educational contributions. This research was conducted by descriptive method through qualitative approach. The research showed that: (1) Regional Education Council of Nagan Raya has only implemented 7 programs in order to give its contributions to the local government in order develop education quality. (2) The mechanism of program implementation is implemented by a good management through focused on planning, organizing, actuating and controlling. (3) The evaluation which made in every program is implemented by a comprehensive evaluation which focused on every problem and gap which occurred. (4) The main obstacle which faced by Regional Education Council Nagan Raya in giving its educational contributions are about Regent's political will and the deficit of district budget.*

---

\*correspondence Address  
E-mail: zulkarnein.satria@gmail.com

**Keywords:** *Contribution, Regional Education Council, Education development*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah kunci utama penentu kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan juga menjadi dasar penting sebagai pembangunan nasional. Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap manusia karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan masa depan seseorang. Hal ini tentunya sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yaitu: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Oleh karena itu, pemerintah melalui badan-badan yang berkonsentrasi dalam mengelola pendidikan bertanggungjawab dalam menyampaikan pendidikan kepada seluruh warganya tanpa terkecuali.

Pembangunan pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan serius dan menyeluruh oleh pemerintah, keluarga, masyarakat maupun pengelola pendidikan tertentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapat roh baru dalam pelaksanaannya sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maka visi pembangunan pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif dan berakhlak mulia.

Berdasarkan rumusan diatas, dapat kita simpulkan bahwa, untuk mencapai pendidikan yang baik bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan sebuah usaha yang kompleks dan membutuhkan pemikiran yang mendalam dari berbagai pihak yang berkompeten dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, bangsa yang berkualitas adalah bangsa yang manusianya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, bertanggung jawab, produktif, dan professional serta sehat jasmani dan rohani.

Fajar (Rusniati, 2015:109) menyatakan setidaknya ada 4 tantangan utama pendidikan di era globalisasi ini, yaitu: Pertama, globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Kedua, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat. Ketiga, hasil-hasil survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Keempat, masalah rendahnya tingkat social-capital. Inti dari social capital adalah trust (sikap amanah).

Memperhatikan kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita ketahui bahwa mutu pendidikan nasional saat ini masih jauh dari kata baik. Aceh sendiri termasuk kedalam salah satu provinsi yang menempati tingkat mutu pendidikan nasional yang rendah. Majid (2014) menyampaikan bahwa “mutu pendidikan Aceh berada di atas ranking 25 dari 34 provinsi di Indonesia, padahal dana yang dialokasikan untuk sektor ini menempati ranking ketiga terbesar di Indonesia.

Di samping itu, Pemerintah daerah juga mempunyai kekuatan untuk memberikan dukungan dan motivasi masyarakat (orang tua peserta didik) untuk secara lebih aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selaras dengan hal itu, Provinsi Aceh

secara khusus memiliki lembaga yang berkonsentrasi dalam membantu pemerintah daerah untuk memberikan usulan-usulan kebijakan pendidikan yang dikenal dengan Majelis Pendidikan Daerah. Lembaga ini resmi dan diakui dalam pemerintahan Aceh yang ditugaskan sebagai badan untuk memajukan dan memmberi penilaian tentang pendidikan di Aceh kepada pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 3 tahun 2006 menjabarkan 15 tugas Majelis Pendidikan Daerah yang harus dijalankan dalam rangka membantu pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan yaitu:

- Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan
- Menyusun konsep pendidikan Islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan masyarakat
- Mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang Islami
- Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kepala sekolah kemampuan profesional.
- Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan.
- Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren
- Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program- program pendidikan
- Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta
- Menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
- Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/ madrasah
- Meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional
- Menyusun perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa
- Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan

Dari permasalahan dan tugas Majelis Pendidikan Daerahh di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada banyak pekerjaan Majelis Pendidikan Nagan Raya dalam rangka menjalankan wewenang dan tugasnya untuk memberikan kontribusi pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, sangat menarik bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana kontribusi manajemen Majelis Pendidikan Nagan Raya dalam pembangunan pendidikan.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sugiyono (2015) menyampaikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme /enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara historis, sehingga data-data yang akan diteliti berfokus kepada data, program, masalah dan fenomena masa lalu. Menurut Yusuf (Ferdiansyah, 2015:13), penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis, akurat dan objektif suatu kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretatif.

Pada penelitian ini, peneliti meletakkan fokus penelitian pada ruang lingkup program-program Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yaitu dari bulan maret sampai dengan bulan Juni. Subjek penelitian disini adalah ketua dan komisioner Majelis Pendidikan Nagan Raya.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposif sampling*. Siyoto dan Sodik (2015:66) menjelaskan bahwa *purposif sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri dibantu dengan alat penelitian lainnya, seperti: lembar pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Uji kredibilitas terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data kualitatif (hasil pengamatan dan wawancara) antara masing-masing subjek penelitian, yaitu ketua dan komisioner Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Kemudian penulis dapat menganalisis hasil wawancara dan menyesuaikannya dengan hasil studi dokumentasi. Pada akhirnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Menurut Walidin, *et.al.* (2015), Uji kredibilitas data adalah suatu proses untuk mengatur mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Tahapan pelaksanaan penelitian kualitatif adalah tahapan orientasi; tahapan eksploitasi dan tahap *member check*".

Setelah pengumpulan data telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan pola kualitatif. Dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis melalui tahapan reduksi data; penyajian data; pengambilan kesimpulan lalu diverifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Program yang Dilaksanakan**

Pada tahun 2019 Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya telah melaksanakan tujuh program secara keseluruhan terkait pelaksanaan fungsinya. tujuh program tersebut meliputi: peninjauan Ujian Nasional; sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam peningkatan mutu pendidikan; pelaksanaan pengawasan peningkatan mutu pendidikan daerah; sosialisasi sekolah ramah anak; sosialisasi dan pembinaan

komite sekolah; seminar pendidikan Dayah (Pesantren) dan pelatihan manajemen Dayah (Pesantren)

Peninjauan pelaksanaan Ujian Nasional merupakan program yang digagas oleh Majelis Pendidikan Daerah dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya secara rutin setiap tahun. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat proses secara langsung pelaksanaan Ujian Nasional di setiap sekolah dan memastikan setiap siswa dapat mengikuti Ujian Nasional dengan baik. Hal ini tentunya sesuai dengan wewenang yang diamanatkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 3 tahun 2006 pasal 5 poin a, yaitu mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hal ini terlihat dari Majelis Pendidikan Daerah yang melakukan observasi langsung Ujian Nasional di tingkat SMP. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Ujian Nasional berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga mengawasi secara langsung pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Program selanjutnya adalah pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan utama program ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pesantren di Nagan Raya secara langsung. Program ini sesuai dengan amanat Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam poin 3 tahun 2006 pasal 6 huruf d. yaitu meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan.

Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya juga merealisasikan program sosialisasi Sekolah Ramah Anak. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang baik dan mendukung proses belajar anak. Ini diwujudkan sebagai upaya untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak untuk belajar dengan aman dan nyaman di sekolah.

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya merealisasikan program sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Program ini dilakukan untuk mendorong pihak sekolah untuk dapat memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam membantu memajukan pendidikan. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya memberikan sosialisasi terkait pentingnya peran masyarakat dalam memajukan pendidikan kepada pihak sekolah dan komite. Program tersebut sesuai dengan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2006 pasal 6 poin j. Yakni menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2019, Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya juga melaksanakan program Sosialisasi Pengembangan Komite Sekolah. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengaktifkan dan memberdayakan peran komite pada setiap sekolah di Nagan Raya. Program tersebut sesuai dengan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Qanun nomor 3 tahun 2006 pasal 6 poin k yaitu mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah. Dalam hal ini, Majelis Pendidikan Daerah memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan setiap komite sekolah untuk berperan aktif membantu dan mendukung sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Tidak hanya berorientasi pada pemberian saran dan solusi bagi pengembangan mutu pendidikan di sekolah, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga merealisasikan wewenangnya dalam mewujudkan pendidikan Islam. Hal itu terlihat dari realisasi program Seminar Pendidikan Dayah (pesantren) dan pelatihan Manajemen Dayah (Pesantren) yang diberikan kepada pihak pengelola atau yayasan dari setiap pesantren di Nagan Raya. Kedua program ini digagas langsung oleh Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya melalui komisi Pendidikan Dayah. Tujuan utama dari pelaksanaan program ini adalah untuk memberikan wawasan kepada pengelola pondok pesantren tentang bagaimana mengembangkan kualitas pendidikan pondok pesantren di Nagan Raya. Program ini sesuai dengan wewenangnya yang diamanatkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 3 tahun 2006 pasal 5 poin d. yaitu mengembangkan sistem pendidikan Islam.

### **1. Mekanisme Pelaksanaan Program**

Dalam melaksanakan program-program di atas, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya terlebih dahulu melaksanakan perencanaan program. Perencanaan program dibahas satu tahun sebelum pelaksanaan program. Misalnya program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, perencanaan programnya dan anggarannya akan dibahas pada tahun 2019.

Pembahasan tentang perencanaan program dibahas secara konkrit pada bulan Februari. Setelah program berhasil dirumuskan, kemudian pada bulan Maret Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya menyerahkannya usulan program tersebut kepada Bupati. Dalam hal ini, Bupati memiliki wewenang untuk menentukan apakah usulan program tersebut dapat direalisasikan atau tidak.

Zanah dan Sulaksana (2016) menjelaskan bahwa, perencanaan merupakan fungsi yang sangat vital yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin tetapi juga melibatkan setiap orang dalam suatu organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, sebelum memutuskan program pendidikan yang akan diberikan kepada Bupati, Majelis Pendidikan Daerah terlebih dahulu mengunjungi sekolah, pesantren dan masyarakat untuk mengkaji dan menilai langsung setiap penyelenggaraan pendidikan.

Dalam menentukan sebuah program, sebuah lembaga harus memastikan metode yang jitu untuk memaksimalkan hasil yang ingin ditemukan nantinya. Palinkas (2015) menyatakan ada beberapa unsur untuk mendukung strategi dalam menentukan program di antaranya: (a) manusia, (b) sumber daya, (c) struktur, (d) sistem, dan (e) budaya.

Melalui pernyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa faktor penting untuk mengkaji setiap masalah dalam menentukan sebuah program dapat difokuskan pada faktor manusia. Yaitu bagaimana karakter manusia dalam sebuah daerah, kelebihan dan kekurangan apa saja yang ditemukan dalam internal manusia dan apa saja yang telah dilakukan oleh setiap manusia.

Adapun faktor selanjutnya ialah sumber daya. Sumber daya juga dapat berpengaruh terhadap jalan tidaknya sebuah program. Misalnya sumber daya apa saja yang terdapat pada suatu daerah yang dapat mendukung terealisasinya sebuah program. Sebaliknya, sumber daya apa saja yang tidak tersedia sehingga membuat sebuah program tidak terealisasi.

Faktor yang ketiga adalah struktur. Struktur di sini ialah tentang perangkat susunan pengurus yang membidangi sebuah pekerjaan, misalnya: ketua, wakil, bendahara dan perangkat-perangkat lain yang tersedia.

Faktor terakhir adalah budaya. Budaya merupakan sebuah unsur yang dapat mempengaruhi manusia yang menjalankan sebuah pekerjaan. Karena budaya berkaitan dengan cara bagaimana setiap orang hidup. Sehingga dalam menentukan sebuah program. Penting untuk disesuaikan dengan budaya yang ada dalam sebuah daerah. Sehingga program tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan terlaksana dengan baik.

Dalam menentukan program, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tinjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan program.

Dalam peninjauannya, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya berfokus pada unsur-unsur yang dikemukakan di atas. Dalam kegiatan ini, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya menemukan beberapa masalah seperti: lingkungan sekolah yang kurang bersahabat, distribusi guru yang tidak merata, kurangnya jumlah siswa di beberapa sekolah, dan beberapa masalah lain yang menjadi kajian utama Majelis Pendidikan Daerah dalam merumuskan suatu program.

Disamping itu, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga menemukan ada sebagian besar Pesantren di Nagan Raya tidak memiliki dokumen administrasi penting sebagai bukti pendirian lembaga, seperti: izin operasional, akta notaris, sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM dan bahan atau dokumen lainnya. Terbukti, dari informasi yang diterima Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya, dari 57 pesantren yang terdaftar di Nagan Raya, baru 32 yang menyelesaikan administrasinya.

Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi di lingkungan Pondok Pesantren adalah pada aspek manajemen dan administrasi. Majelis Pendidikan Daerah kerap mendengar keluhan dan protes dari pimpinan Pondok Pesantren atas ketidakpedulian pemerintah Nagan Raya terhadap Pondok Pesantren di Nagan Raya. Beberapa Pondok Pesantren mengeluhkan pemerintah Nagan Raya tidak pernah memberi bantuan untuk pengembangan pendidikan di pondok Pesantren. Padahal, pemerintah Nagan Raya telah mengalokasikan sejumlah dana operasional untuk Pondok Pesantren di Nagan Raya. Namun dalam mengurus dan mengusulkan dana tersebut tentunya harus melalui tahapan-tahapan administrasi yang telah ditentukan.

Setelah melakukan survei lapangan, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya kemudian membawa isu-isu yang dianggap menjadi masalah penting kedalam rapat pembahasan program. Selain itu Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga menjadikan program-program yang telah dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada periode sebelumnya sebagai referensi dalam memutuskan keputusan usulan program. Sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil dalam rapat menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Melalui langkah inilah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya mengorganisasikan setiap anggotanya untuk bersama-sama merumuskan program. Menurut Siagian (Awaludin & Hendra, 2018), kegiatan pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan upaya, metode, dan teknik untuk mendorong anggota organisasi

agar bekerja dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis.

Setelah Majelis Pendidikan Daerah berhasil merumuskan program dan kontribusi terkait kebijakan pendidikan di Nagan Raya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Majelis Pendidikan Daerah adalah membuat standar operasional program yang memuat petunjuk teknis dan pelaksanaan untuk setiap program yang diusulkan. Selain itu, Majelis Pendidikan Daerah juga merancang belanja anggaran secara rinci untuk setiap program yang diusulkan. Majelis Pendidikan Daerah kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada Bupati Nagan Raya selaku pembuat kebijakan. Pada akhirnya, dari sejumlah program yang diusulkan Majelis Pendidikan Daerah pada tahun 2019, Bupati hanya merealisasikan 7 program yang diusulkan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

## **2. Evaluasi Program**

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, setiap 3 bulan dalam setahun. Selain itu, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga melakukan evaluasi terhadap seluruh program setiap akhir tahun. Arikunto dan Jabar (Munthe, 2015) menyatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program. Dalam kegiatan evaluasi pada penelitian ini, fokus utama terletak pada pencapaian tujuan dari setiap pelaksanaan program. Pada tahap ini, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya hanya melakukan evaluasi melalui observasi secara umum.

Misalnya, dari hasil evaluasi Majelis Pendidikan Daerah tentang program pelaksanaan pemantauan peningkatan mutu pendidikan daerah di sekolah. Dalam program ini Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya menemukan banyak masalah krusial terkait penyelenggaraan pendidikan, seperti kurangnya jumlah guru di beberapa sekolah. Majelis Pendidikan Daerah menemukan bahwa beberapa sekolah di daerah terpencil sangat membutuhkan guru untuk mengajar siswa-siswa di sana. Bahkan Majelis Pendidikan Daerah menemukan ada beberapa guru di sebuah sekolah yang ditugaskan untuk mengajar dua mata pelajaran atau lebih diluar mata pelajaran keahliannya. Kondisi ini terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan guru.

Untuk melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut, Majelis Pendidikan Daerah kemudian menawarkan solusi kepada Bupati Nagan Raya untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secepatnya. Majelis Pendidikan Daerah mengusulkan Bupati untuk memberikan intensif dan fasilitas khusus kepada guru yang bersedia untuk mengajar di daerah terpencil. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik para guru untuk mau mengajar di sekolah-sekolah tersebut.

Kegiatan di atas dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi program. Observasi secara umum langsung dilakukan ketika program dilaksanakan tanpa ada persiapan sebelumnya. Padahal, kegiatan evaluasi harus dilakukan melalui beberapa kegiatan manajerial untuk menghasilkan hasil evaluasi yang komprehensif. World Bank Group (2015) menjelaskan, ada 4 langkah kegiatan evaluasi. Langkah pertama adalah merencanakan evaluasi, Langkah kedua adalah menugaskan untuk melakukan evaluasi. Tahap ketiga melakukan evaluasi dan tahap terakhir adalah pelaporan dan tindak lanjut.



Selain program yang mudah dievaluasi dengan observasi langsung, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga menemukan beberapa program yang sangat sulit untuk diamati. Program-program tersebut biasanya dalam bentuk sosialisasi.

Dalam hal ini Majelis Pendidikan Daerah hanya mensosialisasikan informasi-informasi yang penting untuk disampaikan kepada pihak sekolah, pesantren maupun masyarakat. Namun, Majelis Pendidikan Daerah tidak melakukan peninjauan lebih lanjut apakah sosialisasi itu benar-benar bermanfaat dan dilaksanakan atau tidak.

Setelah melaksanakan dan mengevaluasi semua program, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya merangkumnya menjadi sebuah dokumen laporan. Di akhir tahun, Majelis Pendidikan Daerah mencatat hasil pelaksanaan program dan evaluasi program yang telah dijalankan dan kemudian dilaporkan kepada Bupati Nagan Raya. Melalui kegiatan ini, Bupati mendapatkan gambaran tentang kualitas pendidikan di Nagan Raya dan dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan pendidikan yang akan diambil.

### **3. Hambatan dalam Pelaksanaan Program**

Dalam memberikan kontribusinya, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya menemukan beberapa hambatan. Namun hambatan utamanya adalah masalah *Political Will* dari Bupati Nagan Raya. Abazović dan Mujkić (2015) menjelaskan bahwa: *Political Will* adalah ketidakmampuan pemerintah dalam merealisasikan sebuah kebijakan.

Dalam menjalankan tugasnya, usulan Majelis Pendidikan Daerah dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan pendidikan seringkali terabaikan ketika dihadapkan pada aspek *Political Will*. Dalam hal ini Majelis Pendidikan Daerah sebagai lembaga non-teknis hanya memberikan kontribusi melalui usulan dan pertimbangan pendidikan. Namun realisasinya ada pada keinginan Bupati untuk mewujudkannya atau tidak.

Selain itu, defisitnya APBD Kabupaten Nagan Raya juga menjadi alasan utama bagi Bupati Nagan Raya dalam kesulitannya untuk mewujudkan setiap program yang diusulkan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit pasca peralihan pemerintahan bupati dari periode lama ke periode baru membuat kondisi pendidikan di Nagan Raya sulit untuk dikelola.

Menurut Purwanto (2016) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran juga diperlukan karena masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat tidak terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Berdasarkan pernyataan di atas, anggaran berpengaruh besar terhadap *Political Will* Bupati Nagan Raya. Program yang diberikan dapat direalisasikan apabila anggaran yang tersedia sesuai dengan rancangan anggaran yang dibuat di awal perencanaan. Sebaliknya, jika alokasi anggaran tidak tersedia, program akan terhambat atau tidak bisa direalisasikan.

Selain itu, beberapa komisararis juga mengeluhkan kurangnya intensif yang diterima oleh mereka. Dengan kondisi tersebut maka motivasi kerja para komisararis untuk

menjalankan programnya menjadi menurun. Bahkan ada beberapa anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya sering kali tidak hadir ke kantor setiap hari kerja. Tapala (2018) menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu proses pengarahan dan ketekunan setiap individu dengan tingkat intensitas yang tinggi untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan.

## **PEMBAHASAN**

Berikut ini akan dirincikan pembahasan tentang hasil penelitian yang diperoleh.

### **1. Program yang Dilaksanakan**

Pada tahun 2019 Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya telah melaksanakan tujuh program secara keseluruhan terkait pelaksanaan fungsinya. Tujuh program tersebut meliputi: peninjauan Ujian Nasional; sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam peningkatan mutu pendidikan; pelaksanaan pengawasan peningkatan mutu pendidikan daerah; sosialisasi sekolah ramah anak; sosialisasi dan pembinaan komite sekolah; seminar pendidikan Dayah (Pesantren) dan pelatihan manajemen Dayah (Pesantren)

Peninjauan pelaksanaan Ujian Nasional merupakan program yang digagas oleh Majelis Pendidikan Daerah dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya secara rutin setiap tahun. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat proses secara langsung pelaksanaan Ujian Nasional di setiap sekolah dan memastikan setiap siswa dapat mengikuti Ujian Nasional dengan baik. Hal ini tentunya sesuai dengan wewenang yang diamanatkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 3 tahun 2006 pasal 5 poin a, yaitu mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta. Hal ini terlihat dari Majelis Pendidikan Daerah yang melakukan observasi langsung Ujian Nasional di tingkat SMP. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Ujian Nasional berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga mengawasi secara langsung pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Program selanjutnya adalah pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan utama program ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pesantren di Nagan Raya secara langsung. Program ini sesuai dengan amanat Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam poin 3 tahun 2006 pasal 6 huruf d. yaitu meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan.

Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya juga merealisasikan program sosialisasi Sekolah Ramah Anak. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang baik dan mendukung proses belajar anak. Ini diwujudkan sebagai upaya untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak untuk belajar dengan aman dan nyaman di sekolah.

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya merealisasikan program sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Program ini dilakukan untuk mendorong pihak sekolah untuk dapat memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam membantu memajukan pendidikan. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya memberikan sosialisasi

terkait pentingnya peran masyarakat dalam memajukan pendidikan kepada pihak sekolah dan komite. Program tersebut sesuai dengan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2006 pasal 6 poin j. Yakni menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2019, Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya juga melaksanakan program Sosialisasi Pengembangan Komite Sekolah. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengaktifkan dan memberdayakan peran komite pada setiap sekolah di Nagan Raya. Program tersebut sesuai dengan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Qanun nomor 3 tahun 2006 pasal 6 poin k yaitu mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah. Dalam hal ini, Majelis Pendidikan Daerah memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan setiap komite sekolah untuk berperan aktif membantu dan mendukung sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Tidak hanya berorientasi pada pemberian saran dan solusi bagi pengembangan mutu pendidikan di sekolah, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga merealisasikan wewenangnya dalam mewujudkan pendidikan Islam. Hal itu terlihat dari realisasi program Seminar Pendidikan Dayah (pesantren) dan pelatihan Manajemen Dayah (Pesantren) yang diberikan kepada pihak pengelola atau yayasan dari setiap pesantren di Nagan Raya. Kedua program ini digagas langsung oleh Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya melalui komisi Pendidikan Dayah. Tujuan utama dari pelaksanaan program ini adalah untuk memberikan wawasan kepada pengelola pondok pesantren tentang bagaimana mengembangkan kualitas pendidikan pondok pesantren di Nagan Raya. Program ini sesuai dengan wewenangnya yang diamanatkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 3 tahun 2006 pasal 5 poin d. yaitu mengembangkan sistem pendidikan Islam.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan Program**

Dalam melaksanakan program-program di atas, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya terlebih dahulu melaksanakan perencanaan program. Perencanaan program dibahas satu tahun sebelum pelaksanaan program. Misalnya program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, perencanaan programnya dan anggarannya akan dibahas pada tahun 2019.

Pembahasan tentang perencanaan program dibahas secara konkrit pada bulan Februari. Setelah program berhasil dirumuskan, kemudian pada bulan Maret Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya menyerahkannya usulan program tersebut kepada Bupati. Dalam hal ini, Bupati memiliki wewenang untuk menentukan apakah usulan program tersebut dapat direalisasikan atau tidak.

Zanah dan Sulaksana (2016) menjelaskan bahwa, perencanaan merupakan fungsi yang sangat vital yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin tetapi juga melibatkan setiap orang dalam suatu organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, sebelum memutuskan program pendidikan yang akan diberikan kepada Bupati, Majelis Pendidikan Daerah terlebih dahulu mengunjungi sekolah, pesantren dan masyarakat untuk mengkaji dan menilai langsung setiap penyelenggaraan pendidikan.

Dalam menentukan sebuah program, sebuah lembaga harus memastikan metode yang jitu untuk memaksimalkan hasil yang ingin ditemukan nantinya. Palinkas (2015) menyatakan ada beberapa unsur untuk mendukung strategi dalam menentukan program di antaranya: (a) manusia, (b) sumber daya, (c) struktur, (d) sistem, dan (e) budaya.

Melalui pernyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa faktor penting untuk mengkaji setiap masalah dalam menentukan sebuah program dapat difokuskan pada faktor manusia. Yaitu bagaimana karakter manusia dalam sebuah daerah, kelebihan dan kekurangan apa saja yang ditemukan dalam internal manusia dan apa saja yang telah dilakukan oleh setiap manusia.

Adapun faktor selanjutnya ialah sumber daya. Sumber daya juga dapat berpengaruh terhadap jalan tidaknya sebuah program. Misalnya sumber daya apa saja yang terdapat pada suatu daerah yang dapat mendukung terealisasinya sebuah program. Sebaliknya, sumber daya apa saja yang tidak tersedia sehingga membuat sebuah program tidak terealisasi.

Faktor yang ketiga adalah struktur. Struktur di sini ialah tentang perangkat susunan pengurus yang membidangi sebuah pekerjaan, misalnya: ketua, wakil, bendahara dan perangkat-perangkat lain yang tersedia.

Faktor terakhir adalah budaya. Budaya merupakan sebuah unsur yang dapat mempengaruhi manusia yang menjalankan sebuah pekerjaan. Karena budaya berkaitan dengan cara bagaimana setiap orang hidup. Sehingga dalam menentukan sebuah program. Penting untuk disesuaikan dengan budaya yang ada dalam sebuah daerah. Sehingga program tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan terlaksana dengan baik.

Dalam menentukan program, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tinjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan program.

Dalam peninjauannya, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya berfokus pada unsur-unsur yang dikemukakan di atas. Dalam kegiatan ini, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya menemukan beberapa masalah seperti: lingkungan sekolah yang kurang bersahabat, distribusi guru yang tidak merata, kurangnya jumlah siswa di beberapa sekolah, dan beberapa masalah lain yang menjadi kajian utama Majelis Pendidikan Daerah dalam merumuskan suatu program.

Disamping itu, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga menemukan ada sebagian besar Pesantren di Nagan Raya tidak memiliki dokumen administrasi penting sebagai bukti pendirian lembaga, seperti: izin operasional, akta notaris, sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM dan bahan atau dokumen lainnya. Terbukti, dari informasi yang diterima Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya, dari 57 pesantren yang terdaftar di Nagan Raya, baru 32 yang menyelesaikan administrasinya.

Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi di lingkungan Pondok Pesantren adalah pada aspek manajemen dan administrasi. Majelis Pendidikan Daerah kerap mendengar keluhan dan protes dari pimpinan Pondok Pesantren atas ketidakpedulian pemerintah Nagan Raya terhadap Pondok Pesantren di Nagan Raya. Beberapa Pondok Pesantren mengeluhkan pemerintah Nagan Raya tidak pernah memberi bantuan untuk pengembangan pendidikan di pondok Pesantren. Padahal, pemerintah Nagan Raya telah

mengalokasikan sejumlah dana operasional untuk Pondok Pesantren di Nagan Raya. Namun dalam mengurus dan mengusulkan dana tersebut tentunya harus melalui tahapan-tahapan administrasi yang telah ditentukan.

Setelah melakukan survei lapangan, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya kemudian membawa isu-isu yang dianggap menjadi masalah penting kedalam rapat pembahasan program. Selain itu Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga menjadikan program-program yang telah dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada periode sebelumnya sebagai referensi dalam memutuskan keputusan usulan program. Sehingga pada akhirnya keputusan yang diambil dalam rapat menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Melalui langkah inilah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya mengorganisasikan setiap anggotanya untuk bersama-sama merumuskan program. Menurut Siagian (Awaludin & Hendra, 2018), kegiatan pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan upaya, metode, dan teknik untuk mendorong anggota organisasi agar bekerja dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan ekonomis.

Setelah Majelis Pendidikan Daerah berhasil merumuskan program dan kontribusi terkait kebijakan pendidikan di Nagan Raya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Majelis Pendidikan Daerah adalah membuat standar operasional program yang memuat petunjuk teknis dan pelaksanaan untuk setiap program yang diusulkan. Selain itu, Majelis Pendidikan Daerah juga merancang belanja anggaran secara rinci untuk setiap program yang diusulkan. Majelis Pendidikan Daerah kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada Bupati Nagan Raya selaku pembuat kebijakan. Pada akhirnya, dari sejumlah program yang diusulkan Majelis Pendidikan Daerah pada tahun 2019, Bupati hanya merealisasikan 7 program yang diusulkan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

### **3. Evaluasi Program**

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, setiap 3 bulan dalam setahun. Selain itu, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga melakukan evaluasi terhadap seluruh program setiap akhir tahun. Arikunto dan Jabar (Munthe, 2015) menyatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program. Dalam kegiatan evaluasi pada penelitian ini, fokus utama terletak pada pencapaian tujuan dari setiap pelaksanaan program. Pada tahap ini, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya hanya melakukan evaluasi melalui observasi secara umum.

Misalnya, dari hasil evaluasi Majelis Pendidikan Daerah tentang program pelaksanaan pemantauan peningkatan mutu pendidikan daerah di sekolah. Dalam program ini Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya menemukan banyak masalah krusial terkait penyelenggaraan pendidikan, seperti kurangnya jumlah guru di beberapa sekolah. Majelis Pendidikan Daerah menemukan bahwa beberapa sekolah di daerah terpencil sangat membutuhkan guru untuk mengajar siswa-siswa di sana. Bahkan Majelis Pendidikan Daerah menemukan ada beberapa guru di sebuah sekolah yang ditugaskan

untuk mengajar dua mata pelajaran atau lebih diluar mata pelajaran keahliannya. Kondisi ini terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan guru.

Untuk melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut, Majelis Pendidikan Daerah kemudian menawarkan solusi kepada Bupati Nagan Raya untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut secepatnya. Majelis Pendidikan Daerah mengusulkan Bupati untuk memberikan intensif dan fasilitas khusus kepada guru yang bersedia untuk mengajar di daerah terpencil. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik para guru untuk mau mengajar di sekolah-sekolah tersebut.

Kegiatan di atas dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi program. Observasi secara umum langsung dilakukan ketika program dilaksanakan tanpa ada persiapan sebelumnya. Padahal, kegiatan evaluasi harus dilakukan melalui beberapa kegiatan manajerial untuk menghasilkan hasil evaluasi yang komprehensif. World Bank Group (2015) menjelaskan, ada 4 langkah kegiatan evaluasi. Langkah pertama adalah merencanakan evaluasi, Langkah kedua adalah menugaskan untuk melakukan evaluasi. Tahap ketiga melakukan evaluasi dan tahap terakhir adalah pelaporan dan tindak lanjut.

Selain program yang mudah dievaluasi dengan observasi langsung, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga menemukan beberapa program yang sangat sulit untuk diamati. Program-program tersebut biasanya dalam bentuk sosialisasi.

Dalam hal ini Majelis Pendidikan Daerah hanya mensosialisasikan informasi-informasi yang penting untuk disampaikan kepada pihak sekolah, pesantren maupun masyarakat. Namun, Majelis Pendidikan Daerah tidak melakukan peninjauan lebih lanjut apakah sosialisasi itu benar-benar bermanfaat dan dilaksanakan atau tidak.

Setelah melaksanakan dan mengevaluasi semua program, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya merangkumnya menjadi sebuah dokumen laporan. Di akhir tahun, Majelis Pendidikan Daerah mencatat hasil pelaksanaan program dan evaluasi program yang telah dijalankan dan kemudian dilaporkan kepada Bupati Nagan Raya. Melalui kegiatan ini, Bupati mendapatkan gambaran tentang kualitas pendidikan di Nagan Raya dan dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan pendidikan yang akan diambil.

#### **4. Hambatan dalam Pelaksanaan Program**

Dalam memberikan kontribusinya, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya menemukan beberapa hambatan. Namun hambatan utamanya adalah masalah *Political Will* dari Bupati Nagan Raya. Abazović dan Mujkić (2015) menjelaskan bahwa: *Political Will* adalah ketidakmampuan pemerintah dalam merealisasikan sebuah kebijakan.

Dalam menjalankan tugasnya, usulan Majelis Pendidikan Daerah dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan pendidikan seringkali terabaikan ketika dihadapkan pada aspek *Political Will*. Dalam hal ini Majelis Pendidikan Daerah sebagai lembaga non-teknis hanya memberikan kontribusi melalui usulan dan pertimbangan pendidikan. Namun realisasinya ada pada keinginan Bupati untuk mewujudkannya atau tidak.

Selain itu, defisitnya APBD Kabupaten Nagan Raya juga menjadi alasan utama bagi Bupati Nagan Raya dalam kesulitannya untuk mewujudkan setiap program yang diusulkan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Kondisi keuangan

daerah yang mengalami defisit pasca peralihan pemerintahan bupati dari periode lama ke periode baru membuat kondisi pendidikan di Nagan Raya sulit untuk dikelola.

Menurut Purwanto (2016) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran juga diperlukan karena masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat tidak terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Berdasarkan pernyataan di atas, anggaran berpengaruh besar terhadap *Political Will* Bupati Nagan Raya. Program yang diberikan dapat direalisasikan apabila anggaran yang tersedia sesuai dengan rancangan anggaran yang dibuat di awal perencanaan. Sebaliknya, jika alokasi anggaran tidak tersedia, program akan terhambat atau tidak bisa direalisasikan.

Selain itu, beberapa komisararis juga mengeluhkan kurangnya intensif yang diterima oleh mereka. Dengan kondisi tersebut maka motivasi kerja para komisararis untuk menjalankan programnya menjadi menurun. Bahkan ada beberapa anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya sering kali tidak hadir ke kantor setiap hari kerja. Tapala (2018) menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu proses pengarahan dan ketekunan setiap individu dengan tingkat intensitas yang tinggi untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### ***Simpulan***

Melalui penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama tahun 2019, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya telah merealisasikan tujuh program dalam memberikan kontribusi pendidikan kepada pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan pendidikan. Program-program tersebut adalah: Peninjauan Pelaksanaan Ujian Nasional; Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Berperan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan; Pelaksanaan Supervisi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Daerah; Sosialisasi Sekolah Ramah Anak; Sosialisasi dan Pelatihan Komite Sekolah; Seminar Pendidikan Dayah (Pesantren); dan Pelatihan Manajemen Dayah (Pesantren).

Dalam melaksanakan setiap program. Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya terlebih dahulu terjun ke lapangan untuk melihat langsung proses pendidikan di sekolah, pesantren dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk dijadikan bahan perencanaan program yang akan diusulkan kepada Bupati Nagan Raya. Setelah melakukan kajian lapangan, Majelis Pendidikan Daerah kemudian berdiskusi untuk merumuskan usulan program. Setelah program berhasil dirumuskan, maka Majelis Pendidikan Daerah Nagan Raya menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk setiap program yang telah ditentukan. Setelah semuanya selesai, Majelis Pendidikan Daerah kemudian mengajukan proposal program tersebut kepada Bupati untuk merealisasikannya. Terakhir, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan program-program yang telah disetujui oleh Bupati dan melaksanakan segala arahan yang

diberikan terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Nagan Raya.

Evaluasi yang diberikan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya dilakukan setiap 3 bulan dalam setahun dan setiap akhir tahun. Evaluasi disini difokuskan pada permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan penilaian pelaksanaan pendidikan di Nagan Raya. Dalam melakukan evaluasi, Majelis Pendidikan Daerah hanya melakukannya dengan observasi umum. Untuk itu, observasi terhadap setiap masalah yang muncul langsung diberikan pada saat pelaksanaan program. Pada akhirnya evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan pelaporan kepada Bupati agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya mengalami beberapa Hambatan dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan, yaitu *Political Will* pemerintah daerah dalam mewujudkan program Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Masalah defisit anggaran juga menjadi faktor penghambat. Dan yang terakhir adalah kurangnya motivasi pegawai Majelis Pendidikan Daerah untuk menjalankan pekerjaannya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran, di antaranya diharapkan kepada MPD Nagan Raya untuk dapat merealisasikan program-program secara menyeluruh dan sesuai dengan wewenang, fungsi dan tugas sebagaimana yang diamanatkan pada Qanun Nomor 3 tahun 2006.

Dalam pelaksanaan program, diharapkan kepada MPD Nagan Raya untuk berfokus pada kedudukan MPD sebagai lembaga non-teknis yang tugas utamanya adalah memberi masukan dan penilaian terkait pelaksanaan pendidikan di Nagan Raya. Bukan ikut melaksanakan kegiatan bersifat teknis yang telah diusulkan. Di samping itu, koordinasi dan komunikasi dengan *leading sector* baik itu Dinas Pendidikan maupun Dinas Syariat Islam harus diperkuat, sehingga realisasi dari program-program yang diberikan MPD dapat diwujudkan secara komprehensif dan tepat sasaran

Dalam hal evaluasi program, diharapkan kepada MPD Nagan Raya untuk dapat meningkatkan kinerja evaluasi pada setiap komponen dari program yang dilaksanakan. MPD dapat melakukan tahapan-tahapan majerial yang baik dalam melakukan evaluasi terhadap setiap program. Adapun program-program seperti sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan, hendaknya setelah melaksanakan program, MPD Nagan Raya juga bisa melakukan peninjauan lapangan untuk melihat sejauh mana speserta sosialisai atau pelatihan menindaklanjuti program yang disampaikan tersebut. Dengan cara itu, MPD akan mendapatkan gambaran terkait efektif tidaknya program yang telah dilaksanakan. Di samping itu, MPD juga dapat membuat penguatan dan pembenahan program-program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Dalam hal hambatan yang ditemui MPD Nagan Raya, Bupati Nagan Raya harus benar-benar memberdayakan MPD sebagai mitranya dalam pembangunan pendidikan di Nagan Raya. Bupati seharusnya memastikan lembaga ini benar-benar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga pemikir yang akan menganalisis, mengawasi dan menilai setiap pelaksanaan pendidikan di Nagan



Raya. Sehingga dengan begitu, Bupati dapat menerima usulan-usulan program dari MPD dan menjalankan setiap masukan-masukan strategis dari MPD dalam rangka pembangunan pendidikan di Nagan Raya.

Terkait masalah defisitnya anggaran, Bupati diharapkan mampu mengalokasikan anggaran pada program-program MPD yang sangat strategis. Di sisi lain, Bupati seharusnya juga mampu memberikan siasat atau alternatif lain dalam rangka menyediakan kesempatan bagi MPD untuk memberikan kontribusinya.

Bupati juga diharapkan untuk tidak memberikan wewenang dan tugas di luar kedudukan lembaga MPD. Yaitu sebagai badan non-teknis yang berfungsi untuk memberikan sumbangsi pikiran terkait penentuan kebijakan pendidikan yang akan diambil oleh Bupati Nagan Raya.

Ketua MPD diharapkan juga mampu memastikan anggotanya untuk mampu bekerja dengan baik. Hal ini dapat direalisasikan dengan pengarahan-pengarahan terkait tugas dan fungsi MPD kepada setiap anggota. Di samping itu, ketua MPD juga dapat menciptakan iklim kerja yang dapat meningkatkan motivasi kerja dari setiap anggotanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin & Hendra. (2018). *Fungsi Manajemen dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*. Jurnal Untad, (2) 1
- Ferdiansyah. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor: Herya Media
- Majid, M. Sabri Abd. 2014. *Revitalisasi Pendidikan Aceh*. Jurnal Pencerahan, (10) 2
- Muthe, A P. (2015). *Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan*. Jurnal Scholaria, (5) 2
- Palinkas, L. A., S. M. Horwitz, C. A. Green, J. P. Wisdom, N. Duan, and K. Hoagwood. 2015. *Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research*. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 42 (5)
- Purwanto, A. (2016). *Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik terhadap Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, (16)2
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Rusniati. (2015). *Pendidikan Nasional Dan Tantangan Globalisasi*. Jurnal Ilmiah Didaktika, (16)1
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Siyoto, S & Ali S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing: Sleman
- Tapala, I. (2018). *Pengaruh motivasi kerja terhadap Kinerja Pegawai di kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara*. Jurnal Katalogis, (6)1
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang: Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Walidin, W, Saifullah & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK-Ar-Raniry Press
- World Bank Group. (2015). *Managing Evaluations: A How-To Guide for Managers and Commissioners of Evaluations*. Washinton DC
- Zanah, R F M & Jaka Sulaksana. (2016). *Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan*. Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, (4)2
- Abazović, Dino & Asim Mujkić. (2015). *Political Will: A Short Introduction Case Study - Bosnia And Herzegovina*. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)